

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sengketa yang terjadi antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang menimbulkan gejala sosial di masyarakat dengan adanya isu penyebaran agama (kristenisasi), dugaan pelanggaran Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang, dan isu persiapan bisnis. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya penyebaran agama tidak terbukti, IMB yang dikeluarkan oleh pemko Padang sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang tahun 2010-2030, dan adanya isu persaingan bisnis yang turut mempengaruhi eskalasi dalam sengketa ini. Eskalasi sengketa telah mencapai fase *strategies of threats* dengan adanya ancaman dari MUI Sumbar untuk turun ke jalan (demonstrasi) jika dialog dan pertemuan yang dilakukan mengalami kebuntuan. Identitas sosial terlihat dengan adanya *in-group* yaitu mereka yang mendukung penolakan investasi dan *out-group* mereka yang mendukung investasi PT. Surya Persada Lestari. Identitas sosial tercipta dengan adanya prejudis isu penyebaran agama tersembunyi yang dibawa oleh PT. Surya Persada Lestari, stereotip dengan pembedaan non-muslim *dzimmi* (non-muslim yang menjadi penduduk disuatu negeri) dan *harbi* (non-muslim yang menyiarkan agama mereka), serta sikap diskriminasi dengan tindakan penolakan investasi PT. Surya Persada Lestari
2. Upaya penyelesaian sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang telah dilakukan dalam lima kali dialog, satu kali negosiasi, satu kali fasilitasi dan satu kali mediasi. Berbagai upaya penyelesaian tersebut sering kali atas inisiatif dari masyarakat dan seringkali Fauzi Bahar yang

dianggap masyarakat bertanggungjawab terhadap hadirnya proyek PT. Surya Persada Lestari tersebut tidak hadir sehingga menimbulkan *distrust* terhadap pemerintah. Selain itu, Fauzi bahar juga pernah menjanjikan akan mempertemukan para pihak yang menolak investasi tersebut dengan James Riady, namun tidak terlaksana. Ditambah lagi dengan Walikota baru, Mahyeldi Ansrullah, ketika mencalonkan diri sebagai Walikota Padang menandatangani surat pernyataan yang akan membatalkan segala bentuk izin pendirian dan tidak akan memberikan izin pembangunan *superblok* PT. Surya Persada Lestari. Namun, Mahyeldi tidak bisa menepati janji yang telah ditandatanganinya tersebut sehingga memperdalam *distrust* masyarakat terhadap pemerintah dalam sengeketa ini.

5.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat peneliti berikan yaitu :

1. Pemerintah Kota Padang dalam mendatangkan investor baik investor dari dalam negeri maupun investor asing ada baiknya memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, agar tidak tercipta kegaduhan sosial yang bisa menjadi menghambat pembangunan daerah.
2. Penyelesaian sengketa perlu segera dilakukan secara musyawarah mufakat sesuai dengan kearifan lokal Kota Padang. Mediasi fasilitatif dapat menjadi alternatif menyelesaikan sengketa dimana para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, sedangkan mediator mendorong dan meningkatkan komunikasi antarpihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan dan penyelesaian

yang

dapat diterima (*win-win solution*). Mediator harus benar-benar yang berkapasitas memahami sengketa dan memahami cara berkomunikasi yang dapat mendorong dan meningkatkan komunikasi antarpihak yang bersengketa agar tercipta *sustainable peace* dan keamanan wilayah.

3. Perlunya kegiatan semacam loka karya atau *focus group discussion* sebagai sarana membangun komunikasi dan *trust* berbagai pihak.
4. Pemerintah tetap terus bekerjasama dan menjalin komunikasi dengan dengan seluruh pemangku kepentingan dari masyarakat atau *tigo tungku sajarangan* (tokoh agama, tokoh adat, cerdik pandai), TNI dan Polri setempat agar tercipta situasi damai dan aman di tingkat wilayah yang bersengketa agar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia.
5. Pemerintah kota Padang sebaiknya mengedukasi masyarakat agar mampu memahami, memilah, memilih, dan membedakan antara isu dan fakta agar tidak mudah terpengaruh dengan opini serta penggiringan pola pikir yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu.
6. Pemerintah kota Padang diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan, khususnya pada perbedaan suku dan agama, melalui pengembalian nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.